Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta

Notary's Responsibility for The Inconsistency of The Copy Act with The Minuta Deed

Yoefanca Halim*, Fricky Sudewo & Tyas Fidelia*****

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia

Diterima: 10 Oktober 2019; Disetujui: 30 Oktober 2019; Dipublish: 6Desember 2019

*Email: yoefancahalim.9a35@gmail.com, **Email: frickyguardian@rocketmail.com,

***Email: tyasfidelia0506@gmail.com

Abstrak

Notaris selaku pejabat umum berwenang dalam membuat akta autentik berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap amanah, kejujuransaksama, mandiri tak berpihak, dan menjamin terjaganya kepentingan pihak terkait serta membuat. Minuta Akta. Selain itu, dari Minuta.Akta tersebut dikeluarkanlah Grosse.Akta, Salinan.Akta, atau Kutipan.Akta oleh seorang Notaris, sesuai yang diatur dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.30 Tahun 2004.tentang Jabatan.Notaris. Artinya sudah sepatutnya seorang Notaris melaksanakan kewajiban. Namun nyatanya, masih ditemui Notaris yang tidak menjalankan kewajiban, seperti adanya perbedaan antara Akta Salinan dengan Minuta Akta. Dengan melihat hal tersebut memunculkan suatu permasalahan tentang, "Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta?". Mengenai tanggung jawab Notaris, pada umumnya dapat dikaji secara pidana, pidana, UU Jabatan Notaris, dan kode etik Notaris. Tanggung jawab secara pidana menyangkut kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dan dapat dikategorikan sebagai membuat dokumen palsu dalam hal pidana. Sedangkan tanggungjawab menurut UU dan Kode Etik Jabatan Notaris, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, surat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Metode yang digunakan untuk meneliti merupakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Tanggung Jawab Notaris.

Abstract

Notary as a general official has authorization in making an authentic deed and have other powers as referred to in this law or under other laws, as described in the Department of Law Notary. In carrying out his position, a notary is obliged to act as a trustee, honest, equitable, independent, immutated, and keep the interests of the parties and to make the deed Minuta. In addition, a notary is obliged to issue the Grosse deed, copy of the deed, or Deed citation based on Minuta deed, such matters are governed by Law No.2 of 2014 as has been amended by Law No. 30 of 2004 on the Department of notary. It means that a notary is supposed to carry out obligations. But in fact, the notary can still be found that does not carry out obligations as stipulated in the notary law. By looking at this raises an issue about, "What is Notary's responsibility for the inconsistency of the Copy act with the Minuta deed?". In general, the responsibilities of notary public can be examined in the public, criminal, notary LAW, and responsibility for performing the duties of the department under the notary Code of Ethics. Civil liability regarding material truth in the deed made and can be categorized as making false documents in criminal terms. While the responsibilities according to the LAW and the Code of Ethics Department notary, notary may be subject to sanctions in the form of oral warning, letters, temporary stops, and stops with respect or disrespect.

Keywords: Notary, Deed, Notarized Responsibilities.

How to Cite: Halim, Y, Sudewo, F. & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019 : 147 - 154

PENDAHULUAN

Perikatan merupakan hubungan hukum yang sifatnya abstrak. Kata Perikatan/verbinten is lebih luas artinya dibandingkan dengan kata Perjanjian. (Subekti, 2001). Dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum bersifat konkrit antar para pihak. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja memiliki pengaturan mengenai perikatan. Hal tersebut diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III menganut asas kebebasan untuk membuat perjanjian/beginsel der contractsvrijheid (Subekti, 2001). Artinya setiap orang dapat membuat suatu perjanjian, asal ketentuan yang telah ada tidak dilanggar.

Berbicara mengenai perjanjian, tidak lepas dari suatu jabatan atau profesi yang disebut sebagai Notaris. Pasal 1 angka 1 UU No.2/2014 tentang Perubahan Atas UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya. Notaris berkewajiban untuk berpedom pada aturan hokum terkait dalam hal membuat akta sebagai pelaksanaan tugas dan jabatannya (Fitriyeni, 2012). Selain itu, seorang Notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap amanah kejujuran, saksama, mandiri, tak berpihak, dan menjamin terjaganya kepentingan pihak terkait dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat. (1). huruf. UU Jabatan Notaris serta kewajiban lainnya adalah mengikuti protokol notaris dengan membuat Minuta Akta yang kemudian disimpannya, hal ini tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf. b.

Kedudukan akta autentik sangat penting dalam suatu hubungan hukum khususnya perjanjian. Menjadi masalah apabila isi dari Akta Salinan dan Minuta Akta berbeda satu sama lain. Sebagai salah

satu contoh dapat dilihat dalam Putusan MA (Mahkamah Agung) No.2371 K/Pdt/2016, yang putusannya telah dibacakan pada 10 Januari 2017 menyatakan bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan I Made Dapir dikabulkan dan dibatalkannya Putusan PT (Pengadilan Tinggi) Denpasar No.182/PDT/2015/PTDPS, tanggal 30 November 2015 dan dikuatkannya Putusan PN (Pengadilan Negeri) Denpasar No.766/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 21 April 2015. Kasus bermula saat I Made Dapir menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 831 kepada Agus Suparmanto sebagai Termohon Kasasi, dengan bantuan Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT. Kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 15, tertanggal 25 Juli 2011 memuat harga tanah sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan metode pembayaran. Penambahan klausula yang menyebutkan adanya denda 1% perbulan dari keharusan pembayaran dalam hal keterlambatan pembayaran dan uang yang telah dibayar hangus sehingga perjanjian batal demi hukum apabila dalam jangka waktu tiga bulan Termohon terlambat dalam melakukan pembayaran. Setelah akta perjanjian telah ditandatangani, Termohon terlambat dalam melakukan pembayaran.

Melihat hal demikian, Pemohon mengirim surat kepada Termohon dengan tembusan kepada Turut Termohon untuk membatalkan Akta Perjanjian Nomor 15, yang didasarkan pada klausula perjanjian. Akan tetapi, pihak Turut Termohon menyangkal adanya klausula. Tentu saja hal ini terjadi perbedaan antara Akta Perjanjian Nomor 15 dengan Minuta Akta sehingga proses pengadilan harus ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada tahap kasasi, secara ringkas putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Perjanjian diatas ialah otentik serta Turut Termohon diwajibkan untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor

831 kepada Pemohon dan membayar biaya perkara Bersama Termohon. Apabila melihat putusan tersebut, tanggung jawab dari pihak notaris hanya sebatas mengembalikan sertifikat hak milik, meskipun kerugian sudah diterima pihak Pemohon dan Termohon. Hal ini terjadi karena kelalaiannya Turut Termohon selaku notaris. Akan tetapi, tanggung jawab notaris bila dikaji lebih mendalam tidak sebatas mengembalikan sertifikat hak milik dalam hal putusan pengadilan pada studi kasus. Notaris memiliki tanggung jawab dalam hal ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta, yang telah diatur baik dalam UU dan Kode Etik Notaris. Berangkat dari latar belakang tersebut maka memunculkan suatu masalah, "Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta?". Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan tanggung jawab Notaris atas ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta baik secara perdata, pidana, serta berdasarkan UU Jabatan dan Kode Etik Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011).

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam bahan hukum dan bahan non hukum. Kemudian bahan hukum terbagi kedalam dua bentuk, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, KUH-Pidana, KUH-Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Putusan MA (Mahkamah Agung) No.2371 K/Pdt/2016.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, peneliti menggunakan buku-buku teks dan jurnal mengenai tanggung jawab notaris terhadap ketidaksesuaian akta. Adapun bahan penelitian *non* hukum yang digunakan adalah buku teks *non* hukum mengenai etika. Bahwa bahan hukum dan *non* hukum yang kami gunakan untuk menunjang penelitian hukum ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Atas Ketidaksesuaian Akta Salinan Dengan Minuta Akta

Profesi notaris adalah suatu pekerjaan yang mulia (*nobile officium*), karena akta tersebut bisa menjadi dasar hukum atas kepemilikan harta benda, dan menjadi dasar hak dan peranan seseorang. Kesalahan dalam akta yang dibuat notaris mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau menyebabkan tanggungan seseorang atas suatu kewajiban (Anshori, 2009). Tugas notaris adalah mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi antara para pihak baik dalam bentuk tertulis maupun format tertentu. Notaris adalah pembuat surat yang kuat dalam suatu prosedur hukum (Kie, 2007). Pasal 1868 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengartikan akta autentik sebagai suatu surat yang dibuat dalam bentuk yang telah diatur dalam undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal itu dan di tempat dibuatnya akta.

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris memiliki peranan bahwa notaris berkewajiban untuk membuat sebuah akta dalam wujud Minuta Akta yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris. Dari Minuta Akta ini, notaris berkewajiban pula melepaskan Grosse Akta, Salinan Akta maupun Kutipan Akta, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d. Selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa Salinan Akta yang dikerjakan oleh

notaris didasarkan pada Minuta Akta hal ini didasarkan dari ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Salinan Akta ialah Susunan salinan kata yang menggambarkan seluruh bagian akta dan dicantumkan frasa dalam bagian bawah salinan akta, serta isi dari salinan tersebut sama. Biasanya notaris tidak langsung seketika membuat Salinan Akta berdasarkan Minuta yang telah ia tandatangani. Hal yang Notaris lakukan adalah merapikan dengan mencatat perubahan-perubahan yang terdapat pada Minuta akta dalam selemba kertas, yang dapat terdiri dari penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan berdasarkan pasal 48 ayat (2) UU Jabatan Notaris, hal mana perubahan tersebut dinamakan "renvoi" yang biasanya ditulis disisi kiri akta. Perubahan-perubahan tersebut yang kemudian dimasukkan (Inserting) dalam Salinan Akta yang akan dibuat, sehingga di dalam Salinan Akta tidak terdapat lagi renvoi seperti pada Minuta akta sebelumnya. Dalam proses pembuatan Salinan akta, notaris atau pegawai notaris melakukan "calling" atau penyesuaian, dimana pihak yang satu membacakan Salinan Akta dan pihak yang lain menyesuaikan dengan Minuta Akta. Dengan demikian, kesesuaian terhadap bunyi dari Salinan akta terhadap Minuta Akta dapat tercapai. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kekurangtelitian atau kekhilafan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari serta Salinan akta yang dikerjakan oleh Notaris bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberi kepastian hukum terhadap orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak terhadap akta tersebut (Winarno, 2015).

Dalam praktiknya, walaupun telah diatur mengenai renvoi terkadang karena kurang hati-hatian dalam mengambil tindakan dan megabaikan UU Jabatan Notaris, akta autentik lahir dan menimbulkan penderitaan bagi para pihak.

Saat membawa kerugian para pihak, notaris selaku pejabat pembuat akta autentik tersebut tentu tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana (HS dan Nurbani, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut, notaris dapat diminta pertanggungjawabannya atas kebenaran materiil suatu akta yang keliru.

Mengenai Menurut Nico, terdapat 4 point tentang hubungan antara kebenaran materiil dengan tanggung jawab notaries sebagai pejabat berwenang, yakni (Nico, 2003): 1. Dalam hal keperdataan, notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dikerjakannya; 2. Dalam hal pidana, notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 3. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya; 4. Berdasarkan kode etik, notaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tanggung Jawab Secara Perdata

Kewajiban secara perdata konstruksi yuridis yang digunakan untuk tanggung jawab notaris kebenaran materiil dalam suatu akta yang dikerjakan olehnya adalah konstruksi Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tiap pelanggaran hukum yang mengakibatkan beban kerugian pada orang lain, yang karena kesalahannya mengakibatkan beban tersebut untuk mengganti kerugian itu, sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 3 point dari pelanggaran hukum (Fuady, 2010): 1. Pelanggaran hukum dikarenakan kesengajaan; 2. Pelanggaran hukum yang tidak ada kesalahan (tanpa unsur

kesengajaan maupun kelalaian); 3. Pelanggaran hukum karena kelalalian. Apabila melihat kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2371 K/Pdt/2016, Notaris selaku pejabat yang membuat Akta dapat dikatakan telah menimbulkan pelanggaran hukum dengan tidak mencantumkan klausula. Hal ini tentu saja membuat pihak Termohon mengalami kerugian dikemudian hari, yang mewajibkan membayar denda karena keterlambatan pembayaran kepada Pemohon. Dapat diketahui bahwa pada dasarnya perbuatan melawan hukum menimbulkan penderitaan kepada orang lain dan harus mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, pihak Notaris dalam putusan kasasi hanya diwajibkan untuk mengembalikan sertifikat hak milik kepada Pemohon.

Tanggung Jawab Secara Pidana

Tanggung Jawab secara pidana, terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*. Istilah tersebut digunakan untuk kesalahan yang dilakukan oleh profesional dan jabatan-jabatan khusus termasuk notaris (Adjie, 2008). Kesengajaan (*dolus*) menurut hukum pidana adalah kegiatan yang disadari, dimengerti dan diketahui sebagai demikian sehingga tidak terdapat unsur salah paham (Muljatno, 1993). Sedangkan *kealpaan* (*culpa*) adalah terjadinya suatu kegiatan yang dikarenakan kurang hati-hati dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan tersebut juga tidak terpicirkan terlebih dahulu mengenai akibatnya (Saleh, 1983).

Kesengajaan (*dolus*) di dalam hukum pidana memiliki beberapa bentuk, dimana tiap-tiap bentuk dari kesengajaan ini memiliki pengertian dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, seperti kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet alz Oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran/*keinsyafan* pasti atau kewajiban (*Opzet bij Zekerheids-*

bewustzijn), dan Kesengajaan dengan kesadaran/*keinsyafan* kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids-bewustzijn*)

Mengacu pada *dolus* atau kesengajaan, Turut Termohon atau Notaris dikategorikan sebagai “Kesengajaan dengan kesadaran/*keinsyafan* pasti atau kewajiban (*Opzet bij Zekerheids-bewustzijn*). Karena pada dasarnya Notaris-lah yang membuat akta perjanjian antara para pihak. Sudah sepatutnya mengetahui isi atau apa saja yang diperjanjikan serta klausula yang disepakati. Klausula denda yang dicantumkan dapat dikatakan kesengajaan dari pihak Notaris.

Pertanggungjawaban pidana memuat asas kesalahan (*asas culpabilitas*), berlandaskan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang berlandaskan pada tingkatan keadilan yang harus seimbang dalam berpasangan dengan asas legalitas, yang berlandaskan pada ukuran kepastian. Meskipun pada konsepnya pertanggung jawaban pidana berlandaskan kesalahan, akan tetapi terdapat pula pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) (Arief, 2001).

Mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi Notaris adalah kegiatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat (1)), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416). Tiga pasal tersebut dikualifikasikan sebagai pemalsuan surat (*Valschheid in geschrijf*). Pemalsuan Surat pada ketentuan Pasal 263 dibatasi pada pemalsuan dokumen yang dapat melahirkan suatu perikatan atau suatu membebaskan dari utang dan pemalsuan dokumen dengan tujuan pembuktian suatu peristiwa hukum (Anshori, 2009).

Dalam hal Notaris membuat Salinan akta yang tidak sesuai dengan Minuta Akta, dan ketidaksamaan itu menyangkut substansinya, maka oleh Mahkamah Agung

dikategorikan sebagai tindak pidana membuat "Dokumen Palsu", dengan pertimbangan (Anwar, 2011): 1. Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris, Salinan Akta ialah Susunan salinan kata yang menggambarkan seluruh bagian akta dan dicantumkan frasa dalam bagian bawah salinan akta, serta isi dari salinan tersebut sama. 2. Notaris adalah pejabat yang menjalankan profesi hukum sehingga Notaris adalah seorang intelektual atau profesional, karena itu Notaris harus tahu dampaknya bagi pihak lain dengan adanya ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Akta.

Tanggung Jawab Berdasarkan UU Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang notaris wajib patuh pada aturan yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris (Kie, 2000). Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya tidak hanya harus taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga pada ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu aturan yang terdapat dalam kode etik profesinya dan ketentuan ini hanya berlaku bagi kalangan anggota profesi yang bersangkutan. Menurut Austin Fagothey, etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang (Sukarno, 2013).

Etika profesi ialah kewajiban moral yang dilakukan pada suatu profesi, yang mengamati masalah ideal maupun kegiatan yang berkembang terjadi karena adanya tanggung jawab dan kewenangan istimewa yang mengikat dalam profesi itu serta menggambarkan keadaan yang belum jelas dalam penerapan nilai-nilai moral yang masih umum dalam aspek khusus yang nyata dalam kode etik (Tejosaputro, 1995). Sementara kode etik adalah nilai-nilai dan kaedah moral yang

harus diperhatikan dan dilakukan oleh profesional hukum (Bertens, 1997). Kode etik profesi dapat mengalangi atau menghambat kesalahpahaman dan perselisihan serta mencerminkan moral dan nama baik dari anggota kelompok profesi itu sendiri.

Hal tersebut sebagaimana ternyata pada uraian dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yakni: 1) Etika kepribadian notaris; 2) Etika melakukan tugas dan jabatan ; 3) Etika pelayanan terhadap klien ; 4) Etika dalam asosiasi sesama rekan notaris; dan 5) Etika pengawasan terhadap notaris.

Hubungan antara kode etik dengan UU Jabatan Notaris, terdapat di dalam ketentuan Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris dengan sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengharuskan agar Notaris dalam melaksanakan kewajiban jabatannya sebagai pejabat umum, tidak hanya harus patuh pada UU Jabatan Notaris, tetapi harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara (Anshori, 2009).

Dalam hal Notaris membuat Salinan Dokumen tidak sama dengan Minuta Akta, bahwa nyatalah Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatannya yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d UU Jabatan Notaris maupun Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, dimana notaris dalam menjalankan jabatannya, berkewajiban bertindak Jujur, yaitu tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari kepercayaan yang diberikan oleh klien (masyarakat); Saksama dalam arti bahwa seorang notaris harus cermat di dalam menguasai peraturan perundang-

undangan agar akta autentik yang dibuatnya tidak melanggar atau bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku, berarti notaris dari waktu ke waktu wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertalian dengan profesi notaris; Mandiri yaitu notaris dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat dengan salah satu lembaga/institusi, tidak berpihak dimana dalam membuat Akta Notaris, isinya tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain; dan melindungi hak pihak yang terkait dalam peristiwa hukum, penuh rasa tanggung jawab serta harus pula menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang ia lakukan (Wiryomartani, 2011). Ketika seorang Notaris membuat Salinan Dokumen, Notaris harus mencocokkan dengan Minuta Akta sesuai dengan kompetensinya agar dokumen tersebut tidak kehilangan otentitasnya. Apabila Notaris tidak membuat salinan akta tersebut sesuai dengan aslinya, maka Notaris tersebut telah melanggar kewenangan dan telah menyebabkan Minuta yang dibuatnya mengandung keterangan palsu (Purwaningsih, 2015). Adanya ketidaksesuaian bunyi antara salinan akta dengan minuta akta berakibat hilangnya otentitas akta atau batalnya suatu akta notaris, serta dapat mengurangi nilai pembuktian akta otentik dalam aspek formal. Salinan Dokumen yang tidak sama dengan Minuta Akta dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, juga tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum yakni salinan dokumen yang tidak dibuat berdasarkan minuta akta dan salinan dokumen dibuat tidak sama maka dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d UU Jabatan Notaris (Winarno, 2015).

Maka dalam hal Notaris tersebut melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan di dalam

ketentuan Pasal 16. ayat (1) huruf a dan huruf d UU Jabatan Notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 85, notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, surat, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

Sedangkan sanksi di dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulannya, yaitu bahwa notaris mempunyai kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, dimana salah satu pada Pasal 16 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa notaris berkewajiban "membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris". Akta autentik lahir dan dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Saat membawa kerugian para pihak, notaris selaku pejabat pembuat akta autentik tersebut tentu tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya, sehingga notaris dapat diminta pertanggungjawabannya atas kebenaran materiil suatu akta yang keliru. Tanggung jawab secara perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab secara pidana, notaris dapat dikatakan membuat sebuah dokumen palsu, diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris, dapat dikatakan notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang

menyatakan bahwa notaris akan memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang ini dan tidak akan menyimpang dari kepercayaan yang diberikan kepada klien. Hal ini berarti salinan akta akan dibuat sesuai dengan minuta akta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2002). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, AG. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Banten: UII Press.
- Anwar, A.T. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Isi Salinan Akta Dengan Minuta Akta Notaris Dalam Perjanjian Kerja ama (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 54/Pdt/G/2008/Pn.Pbr – Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 94/Pdt/2009/Ptr). Tesis. Depok: FH UI.
- Arief, BN. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bertens, K. (1997). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriyeni, C.E. (2010). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 14 (58).
- Fuady, M. (2010). Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Cet.3. Bandung: Citra Aditya Bakti
- HS, Salim dan Septiana Nurbani, E. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kie, T.T. (2000). Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, Cetakan ke-2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kie, T.T. (2007). Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, Cetakan ke-2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M. (2013). Penelitian Hukum, Cetakan ke-8, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Muljatno. (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nico. (2003). Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Banten: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. (Yogyakarta: CDBSL).
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. Mimbar Hukum. 27(1).
- Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan b Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksan Baru.
- Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sukarno, A. et al. (2013). Filsafat Hukum Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tedjosaputro, L (1995). Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Bayu Grafika.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004)
- Winarno, D.P. (2015). Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian. Arena Hukum. 8(3).
- Wiryomartani, W. (2011). Pelanggaran Pidana/Perdata Dan Tindakan Indisipliner Oleh Notaris". Makalah. Disampaikan pada Seminar Minuta. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 23 Februari 2011.